



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Signifikansi *Networking* International Coalition for Papua  
dengan Asia Justice and Rights terhadap Pemberdayaan  
Perempuan melalui Penelitian “Sa Ada Di Sini”**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Deandra Cinuti Raryarasmi

2016330192

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO. 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Signifikansi *Networking* International Coalition for Papua  
dengan Asia Justice and Rights terhadap Pemberdayaan  
Perempuan melalui Penelitian “Sa Ada Di Sini”**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Deandra Cinuti Raryarasmı

2016330192

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Deandra Cinuti Raryarasmii  
Nomor Pokok : 2016330192  
Judul : Signifikansi *Networking* International Coalition for Papua dengan Asia Justice and Rights terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Penelitian “Sa Ada Di Sini”

Menyetujui untuk diajukan pada  
Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Bandung, 9 Juli 2020

Pembimbing,

**Mangadar Situmorang, Ph.D**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Ratih Indraswari, M.A**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Deandra Cinuti Raryarasmii  
Nomor Pokok : 2016330192  
Judul : Signifikansi *Networking* International Coalition for Papua dengan Asia Justice and Rights terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Penelitian "Sa Ada Di Sini"

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 29 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Dr. I Nyoman Sudira

**Pembimbing**  
Mangadar Situmorang, Ph.D.

**Anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deandra Cinuti Raryarasm

NPM : 2016330192

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Signifikansi *Networking* International Coalition for Papua dengan Asia Justice and Rights terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Penelitian "Sa Ada Di Sini"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil pemikiran peneliti sendiri sebagai hasil dari penelitian dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik dari pihak lain. Pandangan atau pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini telah dikutip berdasarkan standar penelitian yang ada.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Juli 2020



Deandra Cinuti Raryarasm

## ABSTRAK

**Nama : Deandra Cinuti Raryarasm**

**NPM : 2016330192**

**Judul : Signifikansi *Networking* International Coalition for Papua dengan Asia Justice and Rights terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Penelitian “Sa Ada Di Sini”**

---

Dengan diperhatikannya pemberdayaan perempuan dalam agenda pembangunan internasional maupun nasional, negara maupun kelompok masyarakat sipil berupaya memberdayakan, termasuk di tempat-tempat yang masih memiliki tantangan pemenuhan HAM secara umum. Bagi perempuan Papua, keadaan bukan saja menjauhkan mereka dari pemberdayaan, namun juga menjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak kunjung usai. Implementasi kebijakan negara seringnya tidak mencapai mereka di tingkat akar rumput. Menyadari itu, dua aktor non-negara berusaha memenuhi HAM orang Papua, termasuk memberdayakan para perempuan penyintas: ICP yang mengadvokasi di level internasional dan AJAR yang membangun kesadaran pentingnya pemberdayaan di tingkat akar rumput. Menggunakan sub-teori Transnasionalisme, konsep *Networking*, dan teori *Alternative Development*, penelitian mencari interaksi kedua entitas dalam periode pelaksanaan penelitian AJAR “Sa Ada Di Sini” untuk menemukan apakah hubungan keduanya yang tidak langsung berdampak pada hasil penelitian. Melalui studi kasus kolektif yang dilakukan dengan studi pustaka dan literatur, ditemukan bahwa perempuan Papua menunjukkan peningkatan pemberdayaan dalam hidup mereka dan bahwa terdapat interaksi antara AJAR dan empat organisasi anggota ICP yang memengaruhi keberhasilan penelitian. Penelitian menemukan bahwa *networking* antara ICP dan AJAR selama “Sa Ada Di Sini” signifikan terhadap meningkatnya pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya perempuan asli Papua.

Kata Kunci: perempuan Papua, Papua, ICP, AJAR, interaksi, *networking*, PAR, pemberdayaan, “Sa Ada Di Sini”, kesadaran.

## ABSTRACT

**Name : Deandra Cinuti Raryarasmi**  
**Std. Number : 2016330192**  
**Title : Networking Significance of International Coalition for Papua with Asia Justice and Rights towards Women Empowerment through “Sa Ada Di Sini” Research**

---

With the attention towards women empowerment within international and national development agenda, both states and civil society groups make efforts to empower, including in places where challenges on general human rights manifestation still exist. For indigenous Papuan women, the circumstances they face not only alienate them from empowerment, but also trap them in a never-ending cycle of violence. State's policy implementation also rarely reaches them in the grassroots level. Based on the situation, two non-state actors fought for Papuans human rights fulfillment, women survivors' empowerment included in their missions: ICP advocates on international level and AJAR builds awareness of empowerment on grassroots level. Using Transnationalism sub-theory, Networking concept, and Alternative Development theory, this writing looks for interactions between the two entities within “Sa Ada Di Sini” research implementation period to find whether an indirect relation between them is ever impactful to the results of the research. Through collective case study by literature study, it is founded that Papuan women show a certain degree of empowerment in their lives and that there are interactions between AJAR and four organizations members of ICP which can be credited to the success of the research. The writing concludes that networking between ICP and AJAR throughout “Sa Ada Di Sini” conduct is significant to the increase of Papuan women's economical, social, and cultural empowerment.

**Key Words:** Papuan women, Papua, ICP, AJAR, interaction, networking, PAR (participatory action research), empowerment, “Sa Ada Di Sini”, awareness.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rencananya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi mengenai jaringan INGO yang hubungannya berdampak pada sebuah program pemberdayaan perempuan asli Papua. Penulis ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya pada Mas Mangadar Situmorang, Ph.D. atas ilmu, kesabaran, dorongan kepercayaan diri, keyakinan, dan bimbingannya bagi Penulis sepanjang proses berlangsung. Tak lupa, Penulis juga berterimakasih kepada Dr. I Nyoman Sudira atas *passion* dan waktunya yang turut membantu penulisan. Bagi keluarga inti dan kawan Penulis yang terus memberikan dorongan, Penulis juga berterimakasih.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat penyelesaian pendidikan Strata-1 (Sarjana) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Kesadaran Penulis bahwa dalam berproses terdapat kekurangan, baik dalam aspek teknis maupun substansi. Penulis membuka pintu bagi segala kritik konstruktif dan masukan agar penelitian dan topik ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Besar harapan bagi Penulis kiranya penelitian memberikan manfaat bagi pemberdayaan, inklusivitas, dan wawasan.

Bandung, 25 Juni 2020,

Deandra Cinuti Raryarasmii

2016330192

## DAFTAR AKRONIM

AHRC	Asian Human Rights Commission
AIDS	<i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
AJAR	Asia Justice and Rights
BPKP	Buku Paket Kontekstual Papua
BPS	Badan Pusat Statistik
CCPR	Centre for Civil and Political Rights
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
CSW	Christian Solidarity Worldwide
DPRP	Dewan Perwakilan Rakyat Papua
ECOSOC	Economic and Social Council
EGRA	Early Grade Reading Assessment
FBN	Faith-Based Network on West Papua
FI	Franciscans International
HAM	Hak Asasi Manusia
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IBBS	Integrated Survey on Behavior
ICP	International Coalition for Papua
IGO	<i>International Governmental Organization</i>
INGO	<i>International Non-Governmental Organization</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPPI	Ikatan Perempuan Positif IndonesiaIPPIIPPIIPPIIPPI

KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MIFEE	Merauke Integrated Food and Energy State
MNC	<i>Multi-National Corporation</i> MNCMNC
MRP	Majelis Rakyat Papua
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
NIEO	New International Economic Order
P2TPA	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
PAR	Penelitian Aksi Partisipatif
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PWG	Papuan Women's Working Group
RI	Republik Indonesia
SDA	Sumber Daya Alam
SDG	Sustainable Development Goal
SDM	Sumber Daya Manusia
TJAN	Transitional Justice Asia Network
UN	United Nations
UNCAT	United Nations Convention against Torture
UNHRC	United Nations Human Rights Council
UNIFEM	United National Development Fund for Women

UPR	Universal Periodic Review
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WCC	World Council of Churches

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR AKRONIM .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	14
1.2.3 Perumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	16
1.4    Kajian Pustaka .....	16
1.5    Kerangka Pemikiran .....	22
1.6    Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	32
1.6.1 Metodologi Penelitian.....	32
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.7    Sistematika Pembahasan.....	34
1.8 Linimasa Penelitian.....	35
BAB 2 .....	36
ORGANISASI PEMBERDAYA DI TENGAH SITUASI SOSIAL:.....	36
ICP, AJAR, DAN KEADAAN EKONOMI SOSIAL-BUDAYA PEREMPUAN PAPUA .....	36
2.1. ICP dan Mitra-Mitranya.....	36
2.1.1. Asian Human Rights Commission.....	41
2.1.2. Christian Solidarity Worldwide .....	43
2.1.3. Franciscans International .....	44

2.1.4. TAPOL.....	46
2.2. Asia Justice And Rights .....	48
2.2.1. Penelitian Aksi Partisipatif “Sa Ada Di Sini” .....	50
2.3. Ekonomi, Sosial, Budaya: Tantangan Perempuan Papua .....	53
<b>BAB 3 .....</b>	<b>65</b>
<b>RELASI ICP DAN AJAR:.....</b>	<b>65</b>
<b>NETWORKING GUNA KOORDINASI PEMBANGUNAN AKAR RUMPUT</b>	<b>65</b>
3.1. <i>Networking</i> Intra-Koalisi .....	65
3.2. Pemberdayaan Level <i>Grassroots</i> AJAR .....	76
3.3. Signifikansi ICP-AJAR dalam Konteks PAR “Sa Ada Di Sini” .....	87
<b>BAB 4 .....</b>	<b>108</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>112</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks internasional, pentingnya pemenuhan kesetaraan gender sudah disadari dan berusaha diwujudkan aktor negara maupun non-negara yang secara kolektif dimulai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tertuang secara universal dalam Artikel 1 Piagam PBB yang berbunyi “Untuk melaksanakan kerjasama internasional ... dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan terhadap kebebasan fundamental untuk semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”.<sup>1</sup> Pada tahun 2015, negara-negara anggota PBB secara sepakat (*unanimous*) mengadopsi 2030 Agenda for Sustainable Development atau dapat juga disebut Global Goals yang terdiri dari 17 butir Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai panggilan universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua orang merasakan perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030.<sup>2</sup> Keterkaitan tiap SDG, termasuk SDG Nomor 5 Kesetaraan Gender adalah sebagai penyadaran bagi pihak-pihak pewujud SDGs bahwa pelaksanaan pembangunan harus menyeimbangkan keberlangsungan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

---

<sup>1</sup> “Gender Equality,” United Nations, accessed on November 1st, 2019, <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/gender-equality/>.

<sup>2</sup> “Historic New Sustainable Development Agenda Unanimously Adopted by 193 UN Members,” Sustainable Development Goals, September 25, 2019, accessed on October 30, 2019, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/historic-new-sustainable-development-agenda-unanimously-adopted-by-193-un-members/>.

UN Women, salah satu entitas PBB yang dibentuk Sidang Umum PBB pada tahun 2010 dan didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,<sup>3</sup> menyatakan di zaman ini lebih banyak perempuan menjadi tenaga kerja, berada di bidang politik, memegang posisi kepemimpinan, dan mendobrak stereotipe maupun tabu sosial.<sup>4</sup> Terlebih lagi dalam konteks Global Goals, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bersinggungan dengan berbagai aspek kehidupan, sehingga kedua hal dilihat sebagai tujuan dan juga syarat untuk mencapai semua SDGs yang saling terkait. Banyak penelitian kontemporer membuktikan hubungan antara gender dan pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan manajemen sumber daya.

Sebagai cita-cita kolektif global yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang, perumusan Global Goals melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak baik dari pemerintahan maupun non-pemerintah<sup>5</sup> sehingga menghasilkan Global Goals yang universal dan dapat diaplikasikan negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang menjadi tujuan sekaligus syarat tercapainya semua SDGs

---

<sup>3</sup> Mattias Sundholm, "UN Women: The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women," Office of the Secretary-General's Envoy on Youth, accessed on October 30, 2019, <https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/un-women-the-united-nations-entity-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women/>.

<sup>4</sup> UN Women, *Women and Sustainable Development Goals*, 2016, pp. 20-21, [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2322UN Women Analysis on Women and SDGs.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2322UN%20Women%20Analysis%20on%20Women%20and%20SDGs.pdf).

<sup>5</sup> Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), "International Issues: The 2030 Agenda for Sustainable Development: A New Roadmap to Achieve Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls," *International Issues The 2030 Agenda for Sustainable Development: A New Roadmap to Achieve Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls* (Muscat, 2016), pp. 1-17), [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9783ESCWA\\_2030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-Gender%20Equality.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9783ESCWA_2030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-Gender%20Equality.pdf).

menunjukkan pentingnya isu-isu gender dalam hubungan internasional dan besarnya pengaruh gender, di sebuah tempat terpencil di sebuah negara berkembang pun, dalam menentukan berhasil atau tidaknya perwujudan perdamaian dan kesejahteraan secara global.

Berhasilnya *gender mainstreaming* di tingkat global, yang paling baru dan universal terlihat dengan diterimanya Global Goals ini, membawa isu gender ke ranah nasional, bahkan lokal. Dijabarkannya detail mengenai persyaratan dan kondisi berupa cara-cara kunci implementasi untuk pemenuhan per butir Global Goals dalam 2030 Agenda merupakan bentuk kesadaran akan beragamnya kondisi nasional tiap negara anggota dan dukungan akan usaha negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup> Dengan adanya detail ini, Indonesia dapat berpartisipasi dengan lebih mudah dalam mewujudkan SDG Nomor 5 Kesetaraan Gender sesuai dengan kaidah yang ditetapkan 2030 Agenda. Indonesia yang berupa negara kepulauan menghadapi tantangan yang berbeda dari negara lain, beberapa di antaranya usaha yang lebih untuk mendistribusikan kesejahteraan ke daerah-daerah terpencil dan budaya yang beragam dengan adat dan kebutuhan berbeda. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, setiap daerah dan budaya di Indonesia harus dirangkul dan diinkluskikan dalam kebijakan yang memfasilitasi kebutuhan budaya, termasuk Provinsi Papua.

---

<sup>6</sup> Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), "International Issues: The 2030 Agenda for Sustainable Development: A New Roadmap to Achieve Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls," International Issues The 2030 Agenda for Sustainable Development: A New Roadmap to Achieve Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls (Muscat, 2016), pp. 1-17), [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9783ESCWA\\_2030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-Gender%20Equality.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9783ESCWA_2030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-Gender%20Equality.pdf).

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki luas gabungan sekitar 319 ribu kilometer persegi, menjadikan wilayahnya lebih besar daripada provinsi maupun daerah lain manapun di Indonesia.<sup>7</sup> Parsudi Suparlan memperbaharui kategorisasi bentang alam Papua dengan mengusulkan pola pembagian kebudayaan yang lebih luas menjadi wilayah pantai dan pulau, pedalaman, dan dataran tinggi. Bentang alam Papua yang beragam dihuni 255 suku berbeda, beberapa di antaranya adalah suku Asmat, Biak, Dani, Komoro, Korowai, dan Sentani.<sup>8</sup> Suku-suku asli Papua yang berbeda ini menjaga kelestarian adat mereka dengan baik dan mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari.

Praktik budaya suku-suku Papua tidak lepas dari peran penting perempuan Papua dalam keluarga dan masyarakat. Mientje Rumbiak, seorang perempuan Papua, sampai mengatakan bahwa keberadaan perempuan Papua di kebun dan ladang adalah bagaimana kekuatan dan kearifan asli Papua diwariskan karena kebun menjadi landasan jati diri perempuan Papua yang merawat keluarga dan komunitas.<sup>9</sup> Di rumah, perempuan Papua mengambil berperan sebagai istri mitra suami, ibu rumah tangga, pendidik utama anak, dan ibu bangsa yang mempersiapkan generasi penerus.<sup>10</sup> Adat dan budaya memerlukan laki-laki dan perempuan dalam pelestariannya dan tentu saja peran penting perempuan di kebun,

---

<sup>7</sup> “Ini Urutan Provinsi Terluas di Indonesia,” katadata.co.id, January 16<sup>th</sup>, 2018, accessed on March 2<sup>nd</sup>, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/16/perbandingan-luas-wilayah-provinsi-indonesia>.

<sup>8</sup> “Sekilas Papua”, Pemerintah Provinsi Papua, accessed on March 3<sup>rd</sup>, 2019, <https://papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>.

<sup>9</sup> Dodi Yuniar, ed., *Sa Ada Di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan Yang Tak Kunjung Usai* (Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR), 2017), p.14).

<sup>10</sup> Toli Post, “Eksistensi perempuan Papua di tengah kemajuan teknologi,” Medium, October 27<sup>th</sup>, 2018, accessed on March 4<sup>th</sup>, 2019, <https://medium.com/@tolipost/eksistensi-perempuan-papua-di-tengah-kemajuan-teknologi-b1c8ef204fae.pddi>

dalam keluarga, maupun masyarakat berkontribusi besar terhadap pelestarian adat Papua. Pentingnya peran perempuan Papua dalam masyarakat memerlukan adanya hukum-hukum yang dirumuskan untuk memfasilitasi perkembangan dan menjaga diperolehnya hak-hak sosial budaya.

Budaya yang kental dan beragam serta dinamika politik yang terjadi membuat Pemerintah Pusat memberikan status Otonomi Khusus kepada Papua dan Papua Barat yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 dan terwujud dari adanya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pemerintahan daerah kedua provinsi.<sup>11</sup> MRP sendiri berisikan wakil adat, perempuan, dan agama asli Papua dengan fungsi representasi kultural dan kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Keberadaan Otonomi Khusus diharapkan mampu menjadi sarana penyaluran aspirasi kelompok adat Papua dan Papua Barat untuk dapat mewujudkan kehidupan bernegara yang menginklusi kepentingan adat mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B UUD RI, perubahan kedua, tahun 2000.<sup>12</sup> MRP dengan wakil perempuan di dalamnya memiliki fungsi representasi yang bertujuan membawa kepentingan perempuan Papua dalam kehidupan bermasyarakat. Perwakilan dalam badan ini ada untuk meneruskan dan mewakili suara perempuan agar dapat

---

<sup>11</sup> Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, *Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh*, ed. Lili Romli, 1<sup>st</sup> ed. (Jakarta: P3DI, 2012).

<sup>12</sup> Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Antara Teori dan Praktik dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PhD diss. article, Universitas Syiah Kuala, 2015 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015), 8, accessed March 1, 2019, <http://repository.unimal.ac.id/2165/1/otsus%20aceh%20dan%20papua.pdf>.

terwujud kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan kebutuhan perempuan Papua, baik sebagai masyarakat, pelaksana budaya, maupun individu.

Keberadaan NGO dalam masyarakat masuk ke dalam kategori sektor ketiga atau sektor sosial yang muncul dari dalam masyarakat sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh dua sektor lainnya, yaitu negara dan pasar.<sup>13</sup> Adanya NGO juga menunjukkan berjalannya demokrasi yang sehat dalam sebuah masyarakat. Kebangkitan dan signifikansi peran NGO menjadi indikasi bahwa pembangunan sosial bukan lagi tanggung jawab negara dan pasar.<sup>14</sup> Banyak pihak menganggap NGO sebagai sumber keberagaman dan inovasi karena menciptakan pusat-pusat pengaruh di luar negara dan menyediakan cara-cara agar kelompok-kelompok termarjinalkan dapat mengorganisir diri sendiri. Ada juga yang menganggap bahwa NGO memiliki kemampuan untuk mendapat respon negara, mengangkat sebuah isu ke publik, menyediakan layanan terjangkau, meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap sebuah isu sosial, memusatkan fokus pada isu-isu kemanusiaan, dan dalam kasus-kasus ekstrem, menggulingkan sebuah rezim. Gerakan kesetaraan gender merupakan salah satu isu kemanusiaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Semakin tingginya kepedulian terhadap pemberdayaan dan pengembangan perempuan mulai diperhatikan pemerintah, namun NGO memerhatikan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kesetaraan gender, langsung di antara masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil

---

<sup>13</sup> David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development* (Oxon: Routledge, 2009).

<sup>14</sup> Bob S. Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement* (London: RoutledgeCurzon, 2003) p.1).

negara-negara berkembang. Saat sebuah NGO membentuk sebuah koalisi ataupun mendirikan sebuah *network*, nilai-nilai yang menjadi misi semakin mudah disampaikan dengan bantuan sumber daya dari koalisi tersebut. Hal ini membuat perannya begitu krusial di daerah target. NGO dan, secara tidak langsung, pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pihak-pihak yang menjadi *beneficiaries* NGO, mengisi celah-celah pembangunan yang selama ini terabaikan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Beberapa akademisi, termasuk Chiara Bonfiglioli pada tahun 2016, beranggapan bahwa konferensi internasional, termasuk yang membahas isu-isu sosial *low-politics*, sering sarat dengan kepentingan politik negara-negara yang dibawa sesuai konteks politik global masa itu. World Conference on Women pertama menjadi perpanjangan Perang Dingin yang sedang berlangsung, dengan negara-negara yang baru merdeka anggota Gerakan Non-blok dan Group of 77 menekankan hubungan antara emansipasi perempuan dan pembangunan, ketimpangan sosial dan ekonomi, opresi akibat kolonialisme, neokolonialisme, zionisme, dan diskriminasi ras, serta meminta hubungan ekonomi yang adil secara global melalui New International Economic Order (NIEO).<sup>15</sup> Kekhawatiran negara-

---

<sup>15</sup> Chiara Bonfiglioli, "The First UN World Conference on Women (1975) as a Cold War Encounter: Recovering Anti-Imperialist, Non-Aligned and Socialist Genealogies," *FILOZOFIJA I DRUŠTVO* XXVII, no. 3 (September 20, 2016), <https://doi.org/10.2298/FID1603521B>.

negara berkembang memiliki alasan karena ketimpangan sosial dan ekonomi serta dampak kolonialisme dan diskriminasi membuat mereka harus melakukan lebih banyak perbaikan dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk dapat mencapai apa yang negara-negara maju sudah capai. Seema Jayachandran dari Northwestern University dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi angka PDB per kapita sebuah negara, semakin setara laki-laki dan perempuan dalam kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang diterima di pekerjaan, serta semakin rendahnya toleransi kekerasan terhadap perempuan.<sup>16</sup> Mengakui adanya perbedaan kapasitas tiap negara dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Global Goals dirancang dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak agar dapat diaplikasikan negara-negara berkembang.<sup>17</sup> Ketimpangan kapasitas negara maupun antara laki-laki dan perempuan menjadi perhatian UN Women yang dalam penjabaran butir-butir SDGs terhadap perempuan menyatakan bahwa kesenjangan dan disparitas semakin melebar antarnegara maupun di dalam suatu negara.<sup>18</sup> Walaupun perempuan kini lebih maju, diskriminasi gender yang ada tetap membuat perempuan lebih dirugikan dalam keadaan disparitas. Secara global, perempuan memperoleh penghasilan 24% lebih sedikit dari laki-laki dan lebih rentan

---

<sup>16</sup> Seema Jayachandran, "The Roots of Gender Inequality in Developing Countries," *Annual Review of Economics* 7 (2015): pp. 63-88, <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080614-115404>).

<sup>17</sup> Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), "International Issues: The 2030 Agenda for Sustainable Development: A New Roadmap to Achieve Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls," *International Issues The 2030 Agenda for Sustainable Development: A New Roadmap to Achieve Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls* (Muscat, 2016), pp. 1-17), [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9783ESCWA\\_2030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-Gender%20Equality.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/9783ESCWA_2030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development-Gender%20Equality.pdf).

<sup>18</sup> UN Women, *Women and Sustainable Development Goals*, 2016, pp. 20-21, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2322UN%20Women%20Analysis%20on%20Women%20and%20SDGs.pdf>.

dipekerjakan dalam pekerjaan informal maupun tidak aman di negara-negara berkembang. Diskriminasi gender sendiri dapat bersinggungan dengan usia, disabilitas, etnis, status ekonomi, dan banyak aspek identitas lain, semuanya dapat memperparah kesenjangan. Norma sosial di banyak tempat yang memperlakukan perempuan secara tidak adil menciptakan hambatan struktural seperti hukum yang tidak berpihak pada perempuan atau minimnya dana yang dikucurkan pada layanan yang perempuan butuh.

Kesenjangan yang dibahas UN Women terjadi di Indonesia, terutama di Papua. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2017 membaik, Provinsi Papua tetap menjadi satu-satunya provinsi yang masuk kelompok IPM terbawah.<sup>19</sup> Peran MRP dalam menjalankan Otonomi Khusus masih dirasa minim.<sup>20</sup> Pengelolaan dana Otonomi Khusus juga bermasalah, salah satunya terlihat dari tidak tepatnya alokasi dana Kesehatan sehingga menyebabkan kasus gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua yang menelan 71 korban jiwa hingga Januari 2018.<sup>21</sup> Ketidakhadiran pemanfaatan dana Otonomi Khusus, minimnya kapasitas Pemda dalam mengelola dana, lemahnya manajemen internal, dan berantakannya tata kelola anggaran menjadi beberapa alasan tidak

---

<sup>19</sup> Andri Donnal Putera, "BPS: Selama 8 Tahun, Pembangunan Manusia di Papua Masih Rendah," Kompas.com, April 16<sup>th</sup>, 2018, accessed February 23<sup>rd</sup>, 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16/143300326/bps--selama-8-tahun-pembangunan-manusia-di-papua-masih-rendah>.

<sup>20</sup> Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, *Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh*, ed. Lili Romli, 1st ed. (Jakarta: P3DI, 2012).

<sup>21</sup> Galih Gumelar, "Menilik Kembali 15 Tahun Perjalanan Dana Otonomi Khusus Papua," CNN Indonesia, February 7<sup>th</sup>, 2018, accessed March 4<sup>th</sup>, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180207121048-532-274494/menilik-kembali-15-tahun-perjalanan-dana-otonomi-khusus-papua>.

tersalurkannya dana tersebut dengan baik ke daerah dan aspek yang membutuhkan sehingga menyebabkan ketertinggalan kualitas kehidupan di Papua.

Fakta bahwa masalah penyaluran dana Otonomi Khusus diperparah oleh hasil penelitian Asia Justice and Rights (AJAR) periode 2013-2017 yang menunjukkan bahwa proses Otonomi Khusus semakin meninggalkan perempuan Papua.<sup>22</sup> Papua dan Papua Barat memiliki kesenjangan gender terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tingkat kematian ibu tinggi dan angka melek huruf perempuan rendah. AJAR lebih lanjut membuktikan adanya kekerasan terhadap perempuan Papua tanpa adanya proses rehabilitasi trauma yang memadai, hilangnya hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, dan sulitnya akses sarana kesehatan dan manfaat pembangunan. Perempuan Papua juga kehilangan sumber pangan tradisional berupa sagu akibat alih lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.<sup>23</sup> Dari segi domestik, walaupun berperan besar dalam pekerjaan rumah tangga dan agrikultur, perempuan Papua jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terutama terkait tanah adat dan kebun yang mereka garap.<sup>24</sup> Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Kelompok Kerja Perempuan memiliki tugas mewujudkan keadilan dan

---

<sup>22</sup> Dodi Yuniar, ed., *Sa Ada Di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan Yang Tak Kunjung Usai* (Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR), 2017), p.7).

<sup>23</sup> “Kekerasan terhadap Perempuan Papua – keterkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam,” DTE (Down To Earth), May, 2012, accessed on March 4<sup>th</sup>, 2019, <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kekerasan-terhadap-perempuan-papua-keterkaitan-dengan-ekstraksi-sumber-daya-alam>.

<sup>24</sup> Bet Caeyers and Simone Lombardini, *WOMEN’S EMPOWERMENT IN INDONESIA: Evaluation of Papua Women’s Empowerment*, report, OXFAM GB, Effectiveness Review (London & Cardiff: OXFAM GB, 2015), 8, accessed March 2, 2019, <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/347365/er-womens-empowerment-indonesia-effectiveness-review-260315-en.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.

kesetaraan gender dengan melindungi dan memberdayakan perempuan Papua.<sup>25</sup> Tanpa praktik pemerintahan yang baik, hukum yang ada tidak akan ditegakkan untuk melindungi perempuan Papua.

Masalah utama yang ada adalah absennya pemerintah dalam mewujudkan situasi politik dan keamanan yang kondusif, sehingga mengabaikan pembangunan manusia, apalagi perempuannya. Hal ini menyita perhatian banyak pihak, banyak di antaranya datang dari INGO. Beberapa INGO memutuskan untuk bergabung dan menamakan diri sebagai Human Rights and Peace for Papua, yang juga dikenal sebagai International Coalition for Papua (ICP) pada tahun 2003.<sup>26</sup> Koalisi internasional ini terdiri dari organisasi-organisasi religius dan masyarakat sipil yang dibentuk untuk membahas mengenai kondisi HAM di Papua dan Papua Barat yang menurut mereka memprihatinkan dan mendukung solusi damai terhadap konflik-konflik di sana. Selain mengakhiri pelanggaran HAM yang menurut koalisi ini ada, tujuan lain dari beberapa tujuan koalisi adalah untuk berkontribusi terhadap ditegakkannya hukum di Papua dan Papua Barat.<sup>27</sup> Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ICP bekerjasama dengan berbagai mitra, termasuk yang berdomisili di Indonesia. Salah satu mitra lokal yang pernah bekerjasama dengan ICP adalah sebuah NGO dengan basis di Jakarta, Indonesia yang turut mendalami dan melaksanakan program untuk mengatasi masalah perempuan asli Papua. NGO ini

---

<sup>25</sup> Humas Sekretariat MAJELIS RAKYAT PAPUA, "Kelompok Kerja MRP," MRP (Majelis Rakyat Papua), September 5<sup>th</sup>, 2017, accessed on March 3<sup>rd</sup>, 2019, <http://mrp.papua.go.id/en/mrp/kelompok-kerja-mrp>.

<sup>26</sup> "History of the Coalition," Human Rights and Peace for Papua, February 8<sup>th</sup>, 2013, accessed on March 25<sup>th</sup>, 2019, <http://humanrightspapua.org/about-us/2-history-of-the-coalition>.

<sup>27</sup> "Objectives and Methodology," Human Rights and Peace for Papua, March 12<sup>th</sup>, 2013, accessed on March 25<sup>th</sup>, 2019, <http://humanrightspapua.org/about-us/3-objectives-and-methodology>.

bernama Asia Justice and Rights (AJAR) dengan visi untuk berkontribusi terhadap penguatan HAM dan pengangkatan impunitas yang mengakar di region Asia-Pasifik.<sup>28</sup> Berdirinya ICP sebagai sebuah koalisi INGO menunjukkan adanya masalah penegakkan hukum dari sistem pemerintahan yang dibuat khusus dan yang seharusnya dapat membawa kesejahteraan dan menutup kesenjangan serta mewakili kepentingan-kepentingan khusus masyarakat Papua. Seiring dengan itu, pelaksanaan program AJAR merupakan upaya kelompok masyarakat sipil dalam memberdayakan perempuan asli Papua di level akar rumput. Keprihatinan ICP dan AJAR ada karena tidak maksimalnya peran negara dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, dan berjalannya hukum. Masalah lain yang semakin mengukuhkan pentingnya keberadaan sebuah jaringan NGO berasal dari permasalahan akses informasi. Sejak 2015, INGO dan media asing mendapatkan pengawasan ketat dari aparat keamanan dan banyak yang dipaksa angkat kaki dari Papua.<sup>29</sup> Dengan ruang gerak yang terbatas, sebuah organisasi akan lebih sulit memperoleh informasi sendiri.

Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa penduduk asli Papua mengalami masalah eksistensial di tanah mereka sendiri. Berbagai masalah yang ada karena minimnya kehadiran pemerintah dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan merugikan dan menghambat perkembangan orang Papua dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, pihak yang lebih merasakan kerugian dari

---

<sup>28</sup> "Who We Are," asia justice and rights, accessed on 25 November, 2019, <https://asia-ajar.org/who-we-are-2/>.

<sup>29</sup> Gilang Fauzi, "LSM Internasional Tutup Kantor di Papua," CNN Indonesia, December 13<sup>th</sup>, 2015, accessed on February 15<sup>th</sup>, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151213103053-20-97861/lsm-internasional-tutup-kantor-di-papua>.

situasi ini adalah perempuan Papua. Akibatnya, masalah-masalah yang perempuan Papua alami, utamanya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, kerap dikesampingkan. Kehadiran pemerintah yang tidak penuh seharusnya dapat diisi oleh kehadiran NGO sebagai bagian dari *civil society*. NGO dapat berperan sebagai advokat dan mitra dalam pemenuhan hak-hak perempuan Papua yang terabaikan, dapat juga berperan sebagai mitra pemenuhan kesejahteraan sebuah masyarakat, tidak hanya kelompok perempuan saja. Meskipun terjadi pembatasan ruang gerak INGO, keberadaan koalisi INGO, seperti ICP, dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki keprihatinan dan fokus serupa, seperti AJAR, dapat berperan dalam memberdayakan perempuan Papua secara ekonomi, sosial, dan budaya. AJAR bersama lima organisasi perempuan Papua lain melakukan penelitian aksi partisipatif dari tahun 2013 hingga 2017 untuk mendokumentasikan berbagai pengalaman perempuan Papua.<sup>30</sup> Laporan penelitian itu diberi judul “Sa Ada Di Sini” dan berusaha menjadi jawaban atas permasalahan minimnya peran pemerintah dalam memberdayakan perempuan. Berdasarkan keprihatinan dan fokus mengenai Papua yang serupa, beberapa anggota ICP memiliki keterlibatan dengan AJAR guna membantu keberhasilan proses penelitian. Maka itu, peneliti melihat perlunya dilaksanakan penelitian mengenai signifikansi networking antaranggota ICP maupun dengan AJAR dalam menyukseskan penelitian aksi partisipatif AJAR.

---

<sup>30</sup> Dodi Yuniar, ed., *Sa Ada Di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan Yang Tak Kunjung Usai* (Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR), 2017), p.7).

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan banyak menggunakan kata “Papua”, baik untuk merujuk pada konteks Papua sebagai wilayah maupun sebagai penduduk asli. Dalam penelitian ini, secara umum “Papua” sebagai wilayah dipakai untuk memaksudkan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu, saat masuk ke konteks perempuan maupun program dan INGO, wilayah “Papua” merujuk kepada Provinsi Papua. Istilah “orang Papua”, “penduduk Papua”, dan “masyarakat Papua” digunakan untuk memaksudkan definisi orang asli Papua yang disyaratkan UU Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 1 huruf (t) sebagai “Orang yang berasal dari ras rumpun Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua, dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”.<sup>31</sup>

Pembatasan masalah penelitian akan didasarkan pada pelaksanaan penelitian AJAR yang dirangkum dalam laporan berjudul “Sa Ada Di Sini”. Secara alur waktu, penelitian memakai *time range* dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Waktu tersebut dipilih karena menjadi jangka waktu sejak perumusan metode penelitian aksi partisipatif hingga terbitnya laporan sebagai hasil penelitian.<sup>32</sup> *Time range* diselesaikan pada tahun 2017 karena laporan holistik terakhir ICP dengan kolaborator terbanyak dirilis pada tahun 2017. Program-program dan hasil penelitian ICP dan AJAR dibatasi hanya yang terjadi di dan/atau berhubungan dengan daerah asal peserta penelitian. Daerah-daerah tersebut adalah Kota

---

<sup>31</sup> Kompas.com, “Aturan Orang Asli Papua untuk Siapa?” Kompas.com, May 11<sup>th</sup>, 2011, accessed on March 25<sup>th</sup>, 2019,

<https://regional.kompas.com/read/2011/05/11/04560259/aturan.orang.asli.papua.untuk.siapa>.

<sup>32</sup> Dodi Yuniar, ed., *Sa Ada Di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan Yang Tak Kunjung Usai* (Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR), 2017), p.21).

Jayapura, Kabupaten Keerom, Sorong, Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak. ICP memiliki 18 mitra yang juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain dan laporan yang ICP melibatkan puluhan kontributor lokal maupun internasional.<sup>33</sup>

Keterbatasan akses informasi yang ada menjadikan interaksi ICP dengan keempat anggotanya dan ICP sebagai sebuah koalisi dengan AJAR sebagai pelaku primer yang diteliti. Empat anggota ICP ini menjalin kerjasama dengan AJAR dalam *time range* penelitian “Sa Ada Di Sini”. AJAR juga memiliki fungsi advokasi dan memberdayakan *beneficiaries* dalam HAM, sehingga visi dan misinya sejalan dengan ICP.

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Bagaimana *networking* antara ICP dan AJAR signifikan bagi AJAR dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya perempuan asli Papua di level *grassroots* melalui metode partisipatif penelitian “Sa Ada Di Sini”?

---

<sup>33</sup> International Coalition for Papua (ICP) and Westpapua-Netzwerk, comps., *Human Rights in West Papua 2017*, report, International Coalition for Papua (ICP), vol. 5 (Wuppertal: International Coalition for Papua (ICP), 2017), b, accessed February 25, 2019, [http://franciscansinternational.org/fileadmin/media/2017/Asia\\_Pacific/Publications/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf](http://franciscansinternational.org/fileadmin/media/2017/Asia_Pacific/Publications/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf).

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan *networking* antara sekelompok aktor non-negara dalam sebuah koalisi dengan mitra lokal mereka dalam melakukan pemberdayaan di level *grassroots* dalam penelitian “Sa Ada Di Sini”.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Bagi peneliti, penelitian akan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana aplikasi *networking* sebuah koalisi dan organisasi terkait ICP berpengaruh dalam keberhasilan sebuah penelitian aksi partisipatif. Bagi pembaca, penelitian berguna untuk memberikan pertimbangan mengenai bagaimana kompleksitas interaksi aktor-aktor non-negara di ranah global memengaruhi sebuah program di ranah lokal.

### **1.4 Kajian Pustaka**

Koalisi INGO maupun hak perempuan Papua sudah mendapat perhatian beberapa kalangan untuk diteliti dan dilaporkan. Beberapa hasilnya menjadi bahasan dalam bagian *literature review* ini. Salah satunya berupa laporan yang disusun oleh The Hauser Center for Nonprofit Organizations dan The Kennedy School of Government dari Harvard University pada Oktober 2000 dengan judul “Transnational Civil Society Coalitions and the World Bank: Lessons From Project

and Policy Influence Campaigns By L. David Brown and Jonathan Fox”. Koalisi organisasi masyarakat (*civil society organizations/CSOs*) yang terdiri dari berbagai NGO, gereja, gerakan masyarakat asli, dan jaringan HAM dan lingkungan internasional berkali-kali mengkritisi promosi Bank Dunia mengenai strategi pembangunan sosial dan lingkungan mereka yang mahal.<sup>34</sup> *Working paper* ini memetakan pola kasus dari koalisi untuk memengaruhi kebijakan dan studi proyek Bank Dunia. Peta pola disusun untuk mengetahui usaha berdasarkan pengaruh yang berhasil dengan fokus pada pertanyaan mengenai apa saja yang harus koalisi internasional lakukan untuk memengaruhi institusi seperti Bank Dunia dan bagaimana anggota koalisi transnasional saling bertanggungjawab. Terbukti bahwa memengaruhi institusi seperti Bank Dunia tidak hanya memerlukan waktu dan biaya yang banyak, namun juga koalisi yang kompak dan berkelanjutan dan mampu menggerakkan dan menganalisis informasi terkait dengan aktivitas Bank Dunia, membuat informasi tersebut tersedia untuk aktor-aktor utama, dan menggerakkan banyak sumber pengaruh.<sup>35</sup> Agar sebuah koalisi transnasional efektif, mereka harus berkampanye sesuai target karena tujuan yang berbeda membutuhkan koalisi yang berbeda juga,<sup>36</sup> tidak boleh ragu untuk menghubungi pihak-pihak internal institusi target yang berpotensi membantu pencapaian tujuan,<sup>37</sup> menyadari bahwa dampak dari sebuah usaha datang dalam wujud yang berbeda sehingga sukses tidak serta-

---

<sup>34</sup> L. David Brown and Jonathan David Fox, “Transnational Civil Society Coalitions and the World Bank: Lessons From Project and Policy Influence Campaigns,” *The Hauser Center for Nonprofit Organizations and The Kennedy School of Government, Harvard University*, (Cambridge, MA, 2000): 1.

<sup>35</sup> *Ibid*, 9.

<sup>36</sup> *Ibid*, 11.

<sup>37</sup> *Ibid*, 13.

merta berarti semua yang direncanakan berhasil secara tepat,<sup>38</sup> dan menciptakan langkah berupa pengaturan institusional yang dapat diikuti pihak lain dan memungkinkan pengaruh dari *civil society* di masa yang akan datang.<sup>39</sup> Agar sebuah koalisi efektif dalam kondisi minim sumber daya, mereka harus membuat strategi bersama, ikatan kepercayaan, dan pengakuan sumber daya masing-masing yang dapat menyokong aksi kolektif walaupun terdapat konflik dan kesalahpahaman akibat kesenjangan di antara mereka sendiri.<sup>40</sup> Untuk mempertahankan pengaruh bersama dan akuntabilitas, koalisi tersebut harus memperluas basis-basis sosial guna mendapatkan representasi dan suara lokal yang kredibel dengan mendongkrak akuntabilitas melalui spesifikasi “akuntabilitas pada siapa”, menjembatani kesenjangan *power* dan komunikasi antar elemen *civil society* dengan membangun ‘rantai’ organisasional untuk menghubungkan mitra organisasi yang jauh,<sup>41</sup> tetap melakukan negosiasi tatap muka untuk mengklarifikasi tujuan, strategi, tanggung jawab, dan akuntabilitas,<sup>42</sup> serta tidak meremehkan peran individu maupun organisasi kecil dalam menggunakan pengaruh.<sup>43</sup>

*Literature review* selanjutnya bersumber dari artikel jurnal dengan judul “Dinamika Masyarakat Papua pada Era Otonomi Khusus”. Artikel ini membahas dampak otonomi khusus dari sisi politik, sosial, dan budaya. Adanya Otonomi Khusus tidak berarti masalah-masalah di Papua Barat dan Papua terselesaikan.

---

<sup>38</sup> L. David Brown and Jonathan David Fox, “Transnational Civil Society Coalitions and the World Bank: Lessons From Project and Policy Influence Campaigns,” *The Hauser Center for Nonprofit Organizations and The Kennedy School of Government, Harvard University*, (Cambridge, MA, 2000): 14.

<sup>39</sup> *Ibid*, 15.

<sup>40</sup> *Ibid*, 17.

<sup>41</sup> *Ibid*, 18.

<sup>42</sup> *Ibid*, 20.

<sup>43</sup> *Ibid*, 22.

Sama dengan yang dijelaskan dalam *literature review* sebelumnya, masalah tanah adat dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur yang ada menjadi masalah sosial di Papua.<sup>44</sup> Dari segi ekonomi, kurangnya distribusi pendapatan membuat pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tidak terserap di dalam daerah. Geografi, birokrasi, dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi rakyat menjadi penyebab-penyebab masalah ekonomi di kedua daerah. Papua dan Papua Barat yang memiliki beragam budaya juga menghadapi masalah dari segi kultural di mana budayanya dieksotisasi dan dianggap lebih primitif dari budaya lain. Akibatnya, terdapat upaya-upaya masyarakat daerah lain untuk memodernisasi budaya Papua sehingga identitas ke-Papua-an orang Papua terancam tergerus.

The International Journal of Indian Psychology menerbitkan artikel karya Anu Dandona dengan judul “Empowerment of Women: A Conceptual Framework” pada Juni 2015. Sesuai judul, artikel yang akan menjadi artikel ketiga *literature review* menjelaskan mengenai konsep pemberdayaan perempuan secara umum. Pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai proses peningkatan status ekonomi, sosial, dan politik perempuan (yang secara tradisional lebih tidak diuntungkan) dalam masyarakat.<sup>45</sup> Menurut United National Development Fund for women (UNIFEM), terdapat empat arti istilah pemberdayaan perempuan, salah

---

<sup>44</sup> Danny Erlis Waimbo and Prapto Yuwono, "Dinamika Masyarakat Papua Pada Era Otonomi Khusus," *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin XXI*, no. 1 (2012): 28.

<sup>45</sup> Anu Dandona, "Empowerment of Women: A Conceptual Framework," *The International Journal of Indian Psychology* 2, no. 3 (April-June 2015): 36, <https://www.researchgate.net/publication/317042494>.

satunya adalah dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatur dan memengaruhi arah perubahan sosial, untuk menciptakan keteraturan sosial dan ekonomi yang lebih adil secara nasional maupun internasional. Maka dari itu, pemberdayaan adalah konstruksi multilevel merujuk pada individu, organisasi, dan komunitas. Pemberdayaan adalah sebuah proses internasional yang sedang berlangsung, berpusat di komunitas lokal dengan melibatkan sikap saling menghormati, refleksi kritis, perhatian, dan partisipasi kelompok di mana orang-orang yang kekurangan bagian sumber daya berharga mendapatkan akses lebih untuk menguasai sumber daya tersebut. Pemberdayaan perempuan sendiri diukur dari kemampuan seorang perempuan untuk mengambil keputusan rumah tangga, yang menurut para ekonomis termasuk variabel pekerjaan, kesuburan, dan alokasi sumber daya, dibandingkan dengan kemampuan suaminya. Ada juga yang mengukur pemberdayaan dengan mobilitas, keamanan ekonomi, kemampuan pengambilan keputusan, kebebasan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kesadaran serta partisipasi politik perempuan secara relatif.<sup>46</sup> Lebih lanjut, artikel menjelaskan mengenai berbagai penelitian yang membuktikan pemenuhan variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan di suatu komunitas. Artikel diakhiri dengan sembilan anjuran agar pemberdayaan dapat terjadi.

Ketiga *literature review* dipilih karena meliputi variabel berbeda pada topik, namun akan saling melengkapi keseluruhan analisis. Dengan menganalisis usaha-

---

<sup>46</sup> Anu Dandona, "Empowerment of Women: A Conceptual Framework," *The International Journal of Indian Psychology* 2, no. 3 (April-June 2015): 37, <https://www.researchgate.net/publication/317042494>.

usaha koalisi untuk mengubah kebijakan maupun praktik Bank Dunia, *working paper* Harvard kemudian memberikan saran berdasarkan analisis tersebut mengenai bagaimana sebuah koalisi saling berhubungan dan menguatkan diri secara internal, lalu kemudian memanfaatkan sumber daya dan sistem yang ada. Analisis dan saran yang diberikan dapat diaplikasikan pada koalisi transnasional manapun, termasuk ICP dan hubungannya dengan AJAR. *Paper* memberikan gambaran mengenai bagaimana ICP berinteraksi di level internal dan kemudian mitra eksternal untuk dapat mewujudkan visi dan misi serta menyukseskan program. Kekurangan dari *paper* hanya karena minimnya pendalaman aspek pemberdayaan masyarakat yang merupakan *beneficiary* koalisi *civil society*. Artikel jurnal karya Danny Erlis Waimbo and Prapto Yuwono yang terbit pada 2012 ini sudah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah-masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dihadapi penduduk Papua. Sebab dan akibat dari masalah yang ada dijelaskan dengan cukup jelas, dengan argumen yang didasari undang-undang terkait. Namun, artikel jurnal ini tidak berfokus pada dampak masalah terhadap perempuan Papua, objek dari penelitian ini dan kelompok yang lebih dirugikan dalam masyarakat Papua. Sementara itu, tulisan Dandona dapat menjadi kerangka konteks yang tepat untuk pada akhirnya memutuskan apakah perempuan asli Papua sebagai fokus penelitian “Sa Ada Di Sini” sudah mengalami pemberdayaan atau belum. Konsep pemberdayaan Dandona akan memberikan kejelasan pada data dan hasil program yang ada bahwa apakah benar pemberdayaan di bidang-bidang yang disebutkan sudah tercapai. Selain itu, artikel yang menegaskan bagaimana berlapisnya proses pemberdayaan secara tidak langsung menyenggol peran INGO, yang berada di

level internasional dan memiliki peran sebagai organisasi. Secara substansi, Dandona sudah memaparkan variabel-variabel pemberdayaan perempuan dengan sangat lengkap dan jelas. Pemberdayaan di bidang komunitas dan yang menyangkut tradisi lokal merupakan dua hal yang sangat dapat diaplikasikan dalam menganalisis maupun mempraktikkan pemberdayaan perempuan Papua yang dekat secara komunitas maupun adat. Artikel ini sayangnya tidak terlalu membahas faktor-faktor eksternal yang menghambat pemberdayaan perempuan, seperti faktor regulasi pemerintah yang kurang inklusif. Artikel hanya membahas definisi berbagai pihak, konteks pendidikan dan psikologi sebagai fokus, bukti-bukti dari konteks, lalu saran. Penelitian ini akan menambal kekurangan-kekurangan ketiga kajian literatur di atas dengan menganalisis bagaimana kerjasama sebuah koalisi dengan sebuah organisasi membantu penelitian dengan tujuan memberdayakan perempuan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis ICP dan hubungan anggotanya dengan AJAR, sub-teori Transnasionalisme dari teori Liberalisme menjadi teori pokok yang dipakai. Subteori yang hadir dari percabangan teori Interdependensi ini bermaksud memperluas studi Hubungan Internasional di luar cakupan negara.<sup>47</sup> Konsep komunitas internasional didefinisikan Fred Halliday sebagai kemunculan hubungan ekonomi, asosiasi politik, budaya, dan ideologi non-negara yang lintas batas negara

---

<sup>47</sup> Shamima Ahmed and David M. Potter, *NGOs in International Politics*, (Bloomfield: Kumarian Press, Inc., 2006) p.12).

dan merupakan, kurang lebih, sebuah masyarakat yang tidak dibatasi batas.<sup>48</sup> Maka dari itu, NGO masuk ke dalam kelompok lebih besar aktor-aktor non-negara yang juga termasuk di dalamnya *multi-national corporation* (MNC), komunitas spesialis dan ilmuwan, diaspora etnis, teroris lintas-batas, organisasi kriminal, dan seterusnya. Dalam pandangan Transnasionalisme, pendekatan ini tidak hanya berpusat di NGO, namun memiliki relevansi tinggi dalam menganalisis bentuk dinamis kooperasi NGO. “Transnational Relations and World Politics” karya Joseph Nye, Jr. dan Robert Keohane mengangkat pentingnya aktor-aktor non-negara, salah satunya NGO yang beroperasi secara transnasional dan lintas batas, bahkan sampai membentuk koalisi yang berisi entitas-entitas dengan perhatian terhadap satu isu atau paham yang sama.<sup>49</sup> Istilah “transnasional” sendiri digunakan untuk mendeskripsikan aktor maupun pola perilaku dengan fokus baru untuk mempelajari aktor, interaksi, dan koalisi yang terbentuk. Perspektif transnasional ini sangat berguna untuk menganalisis bentuk dinamis dari kerjasama NGO, seperti NGO yang membentuk koalisi lintas batas negara secara independen untuk menyelesaikan sebuah masalah.<sup>50</sup> Transnasionalisme dapat dijadikan teori untuk menganalisis ICP dan bagaimana beberapa anggotanya bekerjasama dengan AJAR, sebuah NGO yang bukan anggota koalisi namun memiliki tujuan yang sama.

Transnasionalisme beberapa kali mengaitkan NGO dengan pembentukan koalisi dan jaringan (*network*). Aktivitas-aktivitas lazim NGO yang dipaparkan

---

<sup>48</sup> Shamima Ahmed and David M. Potter, *NGOs in International Politics*, (Bloomfield: Kumarian Press, Inc., 2006) p.12).

<sup>49</sup> Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, 5th ed. (London: Pearson, 2012) p.143).

<sup>50</sup> Shamima Ahmed and David M. Potter, *NGOs in International Politics*, (Bloomfield: Kumarian Press, Inc., 2006) p.13).

Ahmed dan Potter di buku mereka juga melibatkan pembentukan *network*, selain advokasi dan pemberdayaan.<sup>51</sup> Untuk mendalami hubungan antara anggota-anggota ICP dan AJAR, analisis akan dipertajam menggunakan konsep *networking* oleh Ziad Abdel Samad. Menurut Samad, Direktur Arab NGO Network for Development (ANND), *networking* merupakan alat yang efisien untuk bertukar pengetahuan dan informasi antar-NGO, melancarkan pengambilan keputusan mandiri, menetralkan usaha-usaha untuk menguasai, memengaruhi pengambilan keputusan, dan menggunakan mereka untuk mengangkat efek kebijakan ekonomi privat dan publik di level sosial, budaya, dan lingkungan, yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan motivasi dalam menghadapi tantangan.<sup>52</sup> Beberapa tujuan *networking* adalah untuk menghindari duplikasi layanan, mengembangkan kemampuan melalui pelatihan, *capacity building*, dan pemberdayaan masyarakat sipil serta anggota dan kawan,<sup>53</sup> mempromosikan koordinasi dalam berbagai bidang di dalam maupun luar jaringan, membagikan informasi dan pengalaman untuk mengembangkan kapasitas anggota dalam semua tingkatan profesional, dan mempromosikan solidaritas dan kerjasama dengan anggota maupun non-anggota NGO dalam menghadapi tantangan, mengembangkan SDM dan finansial,<sup>54</sup> dan membantu sesama menjalankan program. *Networking* memiliki banyak kontribusi, di antaranya adalah mengorganisir *lobbying* dan advokasi terhadap kebijakan ekonomi dan sosial, memberdayakan NGO untuk membangun kapasitas dan

---

<sup>51</sup> Shamima Ahmed and David M. Potter, *NGOs in International Politics*, (Bloomfield: Kumarian Press, Inc., 2006) p.15).

<sup>52</sup> Ziad Abdel Samad, "NGO Interaction, Coordination, and Networking," in *Internal Governance for NGOs in Lebanon* (Beirut: Ministry of Social Affairs, 2004), pp. 1-144, p.77).

<sup>53</sup> Ibid, 80.

<sup>54</sup> Ibid, 81.

meningkatkan kesadaran, melaksanakan penilaian yang objektif dan jujur, serta merasionalisasikan SDM dan sumber finansial.<sup>55</sup> *Networking* dapat membentuk ‘visi’ bersama, sebuah tujuan penyatu berbagai NGO, yang berpengaruh terhadap objektif jangka panjang kelompok dan menjadi ‘model *alternative development*’ untuk diraih karena dilihat sebagai ‘*preferential advantage*’.<sup>56</sup> *Networking* juga berusaha untuk memproduksi ‘misi’ untuk objektif masa depan yang hanya dapat diraih melalui kerjasama. Misi menentukan alasan terbentuknya jaringan, legitimasinya, dan filosofi umum terhadap masyarakat dan kelompok target. Misi juga mengkonfirmasi prinsip-prinsip keadilan sosial, membangun budaya anti-kekerasan dengan dasar penghormatan terhadap hak hidup, solidaritas, dan kooperasi, dan harus difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan masyarakat. Pada akhirnya, anggota jaringan mendefinisikan ‘objektif’ khusus yang ditargetkan tercapai dalam jangka waktu tertentu. Terdapat berbagai bentuk mekanisme kerja yang sebuah jaringan dapat lakukan guna menyediakan layanan langsung ke *beneficiaries* secara efektif.<sup>57</sup> Anggota dapat bekerja melalui jaringan untuk membawa perubahan sosial. Jaringan dapat mempersiapkan penelitian mengenai keadaan sekeliling para NGO untuk memberdayakan anggotanya dan berkontribusi terhadap kesadaran dan mobilisasi. Seminar, konferensi, *workshops*, dan pertemuan umum dapat dilaksanakan jaringan. Dialog dan diskusi yang bertujuan untuk mengadopsi langkah-langkah berkelanjutan mempromosikan advokasi dan membentuk kelompok penekan dapat

---

<sup>55</sup> Ziad Abdel Samad, “NGO Interaction, Coordination, and Networking,” in *Internal Governance for NGOs in Lebanon* (Beirut: Ministry of Social Affairs, 2004), pp. 1-144, p.78).

<sup>56</sup> *Ibid*, 79.

<sup>57</sup> *Ibid*, 81.

dimulai dari sesi *training*. Guna mengembangkan alat penyediaan layanan berkelanjutan, mekanisme kerja jaringan termasuk pembentukan sistem informasi berisi berisi objektif, aktivitas, dan metode kerja berbagai NGO berbeda. Selain itu, sistem lokal dan regional untuk melakukan pengawasan implementasi program dan penyediaan informasi bagi anggota dalam bentuk publikasi menguatkan *networking* dan dialog antar-NGO karena mekanisme ini menyebarkan berita dan aktivitas sekaligus mendorong komunikasi, koordinasi, dan hubungan baik. Konsep ini merupakan konsep yang sangat tepat digunakan untuk menganalisis hubungan antara ICP dengan AJAR maupun AJAR dengan NGO lokal sesama pelaksana penelitian aksi partisipatif.

Dalam menganalisis pemberdayaan perempuan asli Papua oleh AJAR dan para mitra lokalnya, teori *Alternative Development* John Clark, dari buku karya Lewis dan Kanji menjadi teori pokok yang dipakai. Bermunculannya tulisan-tulisan mengenai NGO pembangunan di tahun 1990-an memang ditulis oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia NGO, namun tulisan-tulisan tersebut lebih berfokus pada kasus-kasus organisasional individu daripada NGO secara keseluruhan sehingga menghasilkan literatur yang bersifat deskriptif daripada analitis objektif.<sup>58</sup> *Development theory* Lewis dan Kanji yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang menempatkan NGO di dalam *range* mengenai apa itu pembangunan dan bagaimana pembangunan dipraktikkan.<sup>59</sup> Para pekerja di NGO frustrasi dengan abstraksi teoris pembangunan dan merasa banyak aspek diabaikan dari realita

---

<sup>58</sup> David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (Oxon: Routledge, 2009) p.47).

<sup>59</sup> Ibid.

kehidupan masyarakat miskin dan dunia pekerja lapangan maupun pembuatan kebijakan. Pendekatan ortodoks pembangunan seperti teknologi, infrastruktur, aid, pelatihan, dan “penyesuaian struktural” dilihat NGO sebagai masalah politik yang membutuhkan solusi politik, sehingga cara-cara yang dipakai adalah mengatur orang-orang untuk menuntut hak, meminta akses sumber daya, maupun kampanye internasional.<sup>60</sup> Posmodernisme pun bangkit, memberi perhatian pada pentingnya keberagaman sosial dan kultural, keutamaan pengalaman yang terlokalisasi, peran-peran berbagai jenis gerakan perlawanan, dan akar kolonial diskursus pembangunan.<sup>61</sup> NGO lalu menjadi aktor penting dalam perdebatan pembangunan umum dengan sumber daya dan kapasitas untuk memengaruhi, mengklaim identitas sebagai penantang opresi dan ketidakadilan.<sup>62</sup> Mereka kemudian menjadi kelompok penekan dan berkontribusi terhadap kebijakan yang lebih memerhatikan pemerataan kesejahteraan maupun keberlangsungan lingkungan hidup di berbagai negara berkembang.

Pendekatan teoritis yang dipengaruhi oleh posmodernisme dan muncul pada tahun 1980-an adalah pendekatan alternatif atau pembangunan yang berfokus pada manusia (*people-centered development*).<sup>63</sup> Pendekatan ini menekankan pada strategi dan berusaha menghubungkan teori dan praktik, mengkritisi kebijakan pembangunan *top-down*, dan terlibat dengan hubungan antara *power* dan

---

<sup>60</sup> John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations* (West Hartford, CT: Kumarian Press, 1991), p.4).

<sup>61</sup> David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (Oxon: Routledge, 2009) p.52).

<sup>62</sup> John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations* (West Hartford, CT: Kumarian Press, 1991), p.5).

<sup>63</sup> David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (Oxon: Routledge, 2009) p.55).

ketidaksetaraan.<sup>64</sup> Pendekatan alternatif berfokus pada kerja *grassroots* atau akar rumput dan aksi kolektif di mana komunitas-komunitas termarginalkan dapat bertindak secara otonomi untuk lebih menguasai lingkungan yang mereka tinggali. John Clark, pengembang paling berpengaruh pendekatan ini, mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu bukan korban pasif kenyataan, melainkan pemain aktif dalam perjuangan melawan kesengsaraan dan ketidakadilan.<sup>65</sup> Jika NGO ingin berkontribusi dalam mengangkat kemiskinan ataupun melakukan pemberdayaan, mereka harus belajar untuk mengikuti orang-orang, bukannya berharap orang-orang akan mengikuti mereka. Hal ini karena orang-orang sebagai *beneficiaries* tahu kemampuan komunitas mereka sendiri dan tahu apa yang harus dilakukan. Maka itu, pembangunan dilakukan oleh orang-orang, bukan kepada orang-orang. Melalui pendekatan alternatif, pendekatan berorientasi aktor atau *actor-oriented approaches* yang melibatkan pengalaman, praktik, dan strategi sehari-hari kembali dipertimbangkan dan termasuk pengetahuan lokal, keberlanjutan dan gerakan sosial, dan metode berdasarkan tradisi lama yang berpusat pada pengaturan komunitas, pemberdayaan, dan partisipasi.<sup>66</sup> Pendekatan alternatif juga memberikan ruang bagi penelitian dan aktivisme feminis, seperti kritik Ester Boserup (1970) yang menunjukkan bagaimana dominasi gagasan Barat mengenai tugas-tugas perempuan memfasilitasi monopoli laki-laki terhadap teknologi baru

---

<sup>64</sup> David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (Oxon: Routledge, 2009) p.56).

<sup>65</sup> John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations* (West Hartford, CT: Kumarian Press, 1991), p.x).

<sup>66</sup> David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (Oxon: Routledge, 2009) p.56).

dan hasil bumi sehingga membuat perempuan kehilangan pendapatan, status, dan *power*.

Pergeseran fokus ini lebih lanjut mengangkat masalah-masalah ketimpangan gender dalam pembangunan dan menempatkan masalah tersebut dalam perhatian dan tujuan banyak agensi pembangunan di tahun-tahun setelahnya.<sup>67</sup> Berbagai pergeseran pandangan yang dibawa oleh pendekatan alternatif mengusung pentingnya pendekatan pembangunan dari bawah akar rumput (*grassroots*) ke atas (*bottom-up*) yang sudah dilakukan berbagai NGO dari tahun-tahun sebelumnya. Pemikiran *Alternative Development* lain juga berperan dalam mengaitkan aksi lokal ke dalam proses perubahan nasional dan struktural. Korten (1987) berpendapat bahwa NGO dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan dalam proses politik yang menghubungkan inisiatif *grassroots*, gerakan sosial yang lebih luas dan organisasi politik, selain juga membangun apa yang disebutnya sebagai *people-centered development*.<sup>68</sup> Penekanan baru dalam politik dan pembangunan terletak pada kebangkitan minat mengenai pembangunan dan hak, di mana penekanan ini terjadi pada tahun 1990-an sebagai hasil usaha aktivis dan gerakan yang menggunakan kerangka kerja hak untuk mengeklaim keadilan sosial.<sup>69</sup> Bagi Molyneux dan Lazar (2003), pergeseran ini turut mengangkat isu-isu hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam proses pembangunan. Perspektif hak terbukti berguna untuk menekankan pentingnya membangun dialog lokal dalam melindungi hak kelompok-kelompok rentan sehingga membuat NGO pembangunan memerhatikan kebutuhkannya

---

<sup>67</sup> David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, (Oxon: Routledge, 2009) p.57).

<sup>68</sup> Ibid, 58.

<sup>69</sup> Ibid, 59.

transparansi, pengakuan relasi kuasa, dan kebutuhan untuk melihat orang sebagai anggota masyarakat. Clark percaya evolusi organisasi *grassroots* di negara-negara berkembang sangat pesat dan memiliki dampak komunitas, nasional, bahkan internasional yang lebih besar daripada yang dilakukan proyek skala besar maupun pemerintahan suatu negara.<sup>70</sup> Proyek-proyek penting NGO yang dianggap hanya menyediakan kemakmuran relatif harus dilihat sebagai titik awal dari sebuah proses dan harus digunakan NGO sebagai dasar pengalaman dan ilmu untuk menantang pihak-pihak yang lebih bermodal dan berpengaruh untuk mengubah kebijakan pemerintah lokal, langkah-langkah yang dibutuhkan orang-orang termarginalisasi, mempromosikan evolusi organisasi masyarakat dan *grassroots democracy*, serta melobi pemerintah-pemerintah negara maju untuk melakukan perubahan keadilan internasional.

*Development theory* dalam hubungannya dengan NGO merupakan teori yang tepat untuk mengkaji peran ICP dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya perempuan di Papua yang menempatkan ICP sebagai NGO di dalam *range* mengenai apa itu pembangunan dan bagaimana pembangunan dipraktikkan. Karakterisasi pembangunan Bobbington dkk (2007) yang cocok untuk penelitian ini adalah 'Big D' *development* karena tulisan akan mencari tahu bagaimana ICP melalui mitra-mitra lokalnya melakukan intervensi disengaja untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut. Secara lebih spesifik, *alternative theory* sebagai suatu aliran maupun sub-teori dari *development theory* menjadi teori yang paling tepat

---

<sup>70</sup> John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations* (West Hartford, CT: Kumarian Press, 1991), p.xi).

untuk mendalami topik ini. Posmodernisme, teori yang menginspirasi *alternative theory*, dapat digunakan karena berfokus pada di antaranya pentingnya keberagaman sosial dan kultural dan keutamaan pengalaman yang terlokalisasi. Namun, pendekatan alternatif yang berfokus pada kerja *grassroots* dan aksi kolektif komunitas termarginalkan untuk lebih menguasai lingkungan yang mereka tinggali lebih dapat secara lebih dalam menjelaskan pemberdayaan yang terjadi. Perempuan Papua memiliki pengaruh lebih kecil dalam komunitas mereka. Komunitas mereka sendiri, komunitas Papua, mengalami banyak kerugian di berbagai bidang dibandingkan komunitas etnis lain di Indonesia. Maka itu, kerja para perempuan secara kolektif di level akar rumput, karena bantuan oleh mitra lokal ICP, untuk mendapatkan pengaruh lebih di lingkungan mereka cocok untuk dianalisis dengan *alternative theory*. *Actor-oriented approaches* teori ini melibatkan pengalaman, praktik, dan strategi sehari-hari para perempuan Papua dalam mewujudkan pemberdayaan yang diinginkan, termasuk pengetahuan lokal, keberlanjutan dan gerakan sosial, dan metode berdasarkan tradisi lama yang berpusat pada pengaturan komunitas, pemberdayaan, dan partisipasi. Kontribusi ICP dalam pemberdayaan diharapkan turut membangun *people-centered development* seperti yang Korten (1987) nyatakan. Pada akhirnya, minat ICP, melalui mitra, pada pembangunan dan hak untuk mengeklaim keadilan sosial mengakibatkan pergeseran ke arah isu ekonomi, sosial, dan budaya dalam proses pembangunan, seperti menurut Molyneux dan Lazar (2003).

## 1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metodologi Penelitian

Penelitian akan menggunakan metode kualitatif dari John W. Creswell. Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai penelitian yang dimulai dengan asumsi, sebuah pandangan global, kemungkinan penggunaan kaca mata teoretis, dan studi masalah-masalah penelitian yang mempertanyakan makna individu atau kelompok menghubungkan sesuatu dengan masalah sosial atau manusia.<sup>71</sup> Menurutnya, untuk menganalisis masalah yang ada, peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif yang timbul untuk penyelidikan, koleksi data di tempat asalnya yang memiliki hubungan sensitif dengan orang dan tempat terkait, dan analisis data yang induktif dan menetapkan pola atau tema. Laporan atau presentasi akhir yang dibuat menginklusikan pendapat partisipan, pandangan peneliti, dan deskripsi dan interpretasi kompleks masalah, semuanya dapat memperluas literatur atau memberikan ajakan untuk bertindak. Penelitian mengenai signifikansi *networking* ICP dan AJAR dalam *grassroots development* AJAR melalui penelitian aksi partisipatif cocok menggunakan metode kualitatif karena dimulai dengan asumsi bahwa pemberdayaan perempuan Papua tidak berhasil, pandangan global bahwa keterlibatan INGO asing dapat membantu pemberdayaan, menggunakan subteori Transnasionalisme dan pendekatan *Alternative Development*, dan terdapat studi masalah dari kasus-kasus dalam dokumen dan laporan yang menerapkan tema pemberdayaan. Pendekatan terhadap penelitian

---

<sup>71</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2007) p.73).

kualitatif terbagi menjadi lima, salah satunya penelitian *case study* atau studi kasus.<sup>72</sup> Pendekatan ini melibatkan studi sebuah isu yang dieksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam sistem, dapat berupa *setting*, konteks, dll, yang terikat. Creswell melihat pendekatan ini sebagai sebuah metodologi, sebuah tipe desain dalam penelitian kualitatif, sebuah objek studi, maupun produk penelitian. Penelitian ini meneliti satu isu, yaitu masalah ekonomi, sosial, dan budaya perempuan Papua, yang dieksplorasi melalui penelitian AJAR dan mitra-mitranya, kemudian mengaitkan isu tersebut dengan kerjasama AJAR dengan beberapa anggota ICP untuk menyukseskan penelitian tersebut. Konteks yang mengikat ada pada apakah hubungan antara ICP dan AJAR penting bagi program yang dijalankan.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif di mana investigator menjelajahi sebuah atau beberapa sistem terikat (kasus) dalam sebuah kurun waktu, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam dengan melibatkan beberapa sumber informasi dan melaporkan sebuah deskripsi kasus dan tema berdasarkan kasus.<sup>73</sup> Studi kasus sendiri memiliki tiga tipe, salah satunya studi kasus kolektif yang meneliti satu isu namun menggunakan beberapa contoh kasus dari satu maupun beberapa sumber untuk menggambarkan isu. Pendekatan studi kasus kolektif “Sa Ada Di Sini” cocok digunakan karena minimnya pemberdayaan

---

<sup>72</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2007) p.73).

<sup>73</sup> Ibid, 74.

perempuan Papua merupakan sebuah isu yang dieksplorasi melalui beberapa kasus dalam konteks kemitraan kedua organisasi. Peneliti menjelajahi kesaksian para perempuan tersebut dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, lalu mengumpulkan data secara detail dan mendalam mengenai AJAR, ICP, maupun organisasi terkait, dan melaporkan deskripsi hubungan pihak-pihak tersebut dengan program AJAR. Lebih lanjut, studi kasus kolektif dilakukan melalui studi pustaka dan literatur berupa buku, jurnal, laporan, artikel berita, dan informasi resmi dari situs-situs organisasi terkait.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Bab I penelitian akan berisi hasil seminar yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, *research question*, pembatasan masalah, daftar referensi, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*, kerangka pemikiran, sistematika penelitian, dan *timeline*.

Bab II penelitian akan terbagi menjadi 3 sub-bab: “ICP dan Mitra-Mitranya”, “Asia Justice and Rights”, dan “Ekonomi, Sosial, Budaya: Tantangan Perempuan Papua”. Masing-masing sub-bab menjelaskan data terkait variabel-variabel penelitian. Sub-bab “ICP dan Mitra-Mitranya” menjelaskan mengenai ICP dan empat dari belasan anggota yang menjadi bagian dari koalisinya. Sub-bab “Asia Justice and Rights” turut menjelaskan dasar penelitian “Sa Ada Di Sini” yang menjadi konteks dan batasan penelitian. Sub-bab terakhir menjelaskan mengenai keadaan perempuan Papua secara umum saat penelitian, situasi yang dihadapi AJAR dan dilaporkan ICP.

Bab III penelitian akan dibagi menjadi tiga bagian. Sub-bab “Networking Intra-Koalisi” berisi analisis Transnasionalisme dan *Networking* antara ICP dan anggota-anggotanya. Sub-bab “Pemberdayaan Level Grassroots AJAR” menganalisis penelitian “Sa Ada Di Sini” dengan *Alternative Development theory*. Sub-bab “Signifikansi ICP-AJAR dalam Konteks PAR “Sa Ada Di Sini”” akhirnya menyambungkan analisis di kedua bab sebelumnya dan memberikan bukti mengenai dampak *networking* kedua pihak yang memengaruhi kesuksesan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus menggunakan data-data primer dan sekunder dari dokumen-dokumen.

Bab IV penelitian akan berisi kesimpulan penelitian, apakah *networking* ICP dan AJAR signifikan terhadap keberhasilan program AJAR.

### 1.8 Linimasa Penelitian

Ket	2019								2020					
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
I														
II														
III														
IV														

